



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR 1519 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN  
SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Terakhir Sebagai Syarat Pencalonan yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 913 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 916 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 917 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 915 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM UNTUK PEMILIHAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Paling Sedikit Jumlah Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai syarat Pencalonan yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebanyak 6 (enam) kursi; atau
  - b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 161.783 (seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) akumulasi perolehan suara sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu sebanyak 40.446 (Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam) suara sah.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



Hairullahmi

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1519 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TERAKHIR SEBAGAI SYARAT PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

**PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAHUN 2014  
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024**

No	Partai Politik	Perolehan Kursi		Perolehan Suara Sah	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0,00%	5.318	3,29%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	13,33%	15.746	9,73%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	5	16,67%	24.544	15,17%
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	10,00%	25.860	15,98%
5	Partai NasDem	4	13,33%	24.662	15,24%
6	Partai Buruh	0	0,00%	82	0,05%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0	0,00%	363	0,22%
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0,00%	3.884	2,40%
9	Partai Kebangkitan Nasional (PKN)	0	0,00%	22	0,01%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	6,67%	8.492	5,25%
11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0	0,00%	90	0,06%

12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	13,33%	20.337	12,57%
13	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0,00%	199	0,12%
14	Partai Demokrat (PD)	4	13,33%	11.494	7,10%
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0,00%	259	0,16%
16	Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	1	3,33%	4.376	2,70%
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	10,00%	16.055	9,92%
24	Partai Ummat	0	0,00%	0	0,00%
Total Kursi dan Suara Sah		30	100%	161.783	100%

PENGHITUNGAN SYARAT PENCALONAN		HASIL PERHITUNGAN	HASIL PEMBULATAN
A.	JUMLAH SELURUH KURSI DPRD x 20%	6,00	6,00
B.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DPRD x 25%	40.445,75	40.446

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Hairullahmi

